
**FACTORS AFFECTING THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND
MANAGEMENT IN PAKEL TULUNGAGUNG DISTRICT**

Prisda Novia Ananda¹, Novi Khoiriawati²

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

prisdanov@gmail.com, novi_khoiriawati@ymail.com

Abstract: Village fund management accountability as a form of accountability of the holder of the trust to the actions, performance, and decisions of the party giving the trust. With the existence of village funds, its management is required to use aspects of good governance where one of the pillars is accountability. So it is very important to know the factors that influence the accountability of village fund management in the village in Pakel District, Tulungagung Regency. This study aims to explain the influence of the role of village officials, community participation, and the use of information technology on the accountability of village fund management. The data of this study used a questionnaire or questionnaire which was distributed to 19 villages. Sampling using simple random sampling technique with a total sample of 114 respondents. And multiple linear regression analysis method is used to prove the research hypothesis. The results of this study indicate that (1) the role of village officials has a significant positive effect on village fund management accountability, (2) society participation does not impact the accountability of the village fund management nt, (3) technology information utilization has a significant positive effect on the accountability of the village fund management, and (4) the role of village officials, the society participation, and the technology information utilization has a significant positive effect on the accountability of the village fund management.

Keywords: Society Participation, Technology Information Utilization, Accountability Fund Management

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pengelolaan dana desa diperlukan sebagai wujud tanggung jawab terhadap tindakan, kinerja dan keputusan seseorang atau organisasi mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaporan. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas diartikan pemegang amanah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan mengungkapkan serta menyajikan kepada pemberi amanah (*principal*) yang berhak meminta pertanggungjawaban.¹

Akuntabilitas menjadi tolak ukur yang menunjukkan sudah atau belum dalam bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta tanggungjawab atas kinerja pejabat publik atau dalam hal ini yaitu desa terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Sesuai dengan teori *Stewardship* bahwa sebagai prinsipnya instansi pemerintahan dituntut memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat dan tidak berorientasi

pada laba serta sebagai fasilitator dalam pemberdayaan untuk masyarakat tidak fokus pada tujuan individu.²

Pada Kecamatan Pakel sendiri terdapat beberapa kasus diantaranya (1) pernah adanya kasus disalah satu desa di Kecamatan Pakel yaitu Desa Gesikan tentang kekurangan dana desa pada waktu pemilu ditahun 2019. (2) Pernah adanya penyidikan korupsi dana bansos di Desa Ngrance Kecamatan Pakel. (3) Ada di salah satu desa yaitu Desa Pecuk yang belum menunjukkan papan informasi terkait besaran pengeluaran ADD desa, (4) Perekatan perangkat desa masih belum adanya keterbukaan. Ada yang mengangkat keluarganya sendiri, yang itu mempermudah terjadinya proses penyelewengan dana desa. (5) Ada disalah satu desa dikecamatan pakel tulungagung yaitu desa gempolan tahun 2020 terjadi kekosongan Sekertaris desa dan Kaur desa

¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Publisher (Andi Offset), 2018), Hlm. 36

² Donaldson, Lex dan James H, Davis. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns", *Australian Journal of Management*. 2011, Vol. 16. No. 1, hlm 9

padahal sekretaris merupakan pokok utama jalannya roda administrasi desa.³

Sejak disalurkannya dana desa pada 2015, tidak sedikit Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang terjerat kasus penyelewengan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo menyebutkan dalam *Republika.co.id* bahwa “memang ada 900 Kepala Desa yang kena (kasus hukum) dan kami akui itu, memang ada yang harus kami perbaiki dan kami tidak tutup mata.” Presiden menilai dana desa merupakan inovasi dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa, hanya saja akibat lemahnya pengawasan menjadi celah penyalahgunaan dana desa.⁴

Beberapa kasus diatas timbul akibat tidak terealisasinya pertanggungjawaban oleh perangkat desa sebagai penyalur dana desa. Akuntabilitas yang tidak terealisasi dengan baik akan berdampak pada

pembangunan pengembangan desa. Selain itu akuntabilitas yang kurang baik juga dapat menjadi penghambat bagi pemerataan pembangunan desa. Tidak adanya keseimbangan perekonomian desa timbul karena banyak faktor. Seperti pembangunan yang tidak berjalan sesuai anggaran dan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan fisik menandakan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh perangkat desa masih rendah.⁵

Dengan melihat pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, beberapa penelitian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang meliputi peran perangkat desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi perangkat desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan sistem pengendalian internal.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas

³ Penjaringan sekdes dan kaur desa gempolan, <https://gempolan-tulungagung.desa.id> diakses 22 April 2022

⁴ Andri Saubani “Presiden Akui Ada 900 Kades Tersangkut Kasus Dana Desa”, <http://www.republika.co.id> diakses pada tanggal 18 Desember 2021

⁵ Rahmi Kurnia, dkk., *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)*, (Dalam jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 1 No1, Seri B, Februari 2019, Hlm. 170

pengelolaan dana desa pernah dilakukan diantaranya oleh Baiq⁶, Nora⁷, Siti⁸. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian terdahulu sehingga peneliti melakukan pembaruan penelitian dengan mencoba menguji pengaruh peran perangkat desa, fpartisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan sebuah tuntutan untuk mempertanggungjawabkan kinerja, tindakan dan atau

keputusan seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut.⁹

Terdapat dua jenis akuntabilitas yaitu: 1) Akuntabilitas vertikal, merupakan kewajiban pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana pada otoritas yang tingkatnya lebih tinggi. Contohnya pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan kepada bupati atau walikota, 2) Akuntabilitas horizontal, yaitu kewajiban pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana pada masyarakat luas. Contohnya

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.¹⁰

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2010), menunjukkan

⁶ Baiq, dkk., *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah*, Jurnal Akuntansi Vol.30 No.7 2020

⁷ Nora Anggelita, "Faktor- Faktor yang berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang", Akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019

⁸ Siti Nurhayati Nafsiah dan Mei Diana, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya*, Jurnal Ilmiah Bina Manajemen, Vol 3 No 2 2020

⁹ Halim A. dan M. Iqbal, *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Tiga*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2012), hlm. 43

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20.

bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya.

Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban seseorang yang diberi perintah agar bertanggungjawab, menyerahkan dan menjalankan semua aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tugas kepada pihak pemberi amanah yang punya hak dan kuasa untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain, akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya melalui Laporan APBDES.

Peran Perangkat Desa

Peran yaitu berkaitan dengan tugas yang dijalankan oleh individu terhadap posisi atau kedudukannya

dalam suatu bentuk sistem sosial.¹¹ Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa.¹²

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (2006 : 10), antara lain : a) Kebijakan yang dibuat penyelenggaraan pemerintah desa harus ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, b) Adanya rancangan peraturan desa, c) Menyusun dan mengerjakan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

¹¹ Blalock, Hubert M. Jr, *Pengantar Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2018), hlm. 7

¹² Neny Tri Indrianasari, *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*, (dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak STIE Widya Gama Lumajang, Vol. 1 No. 2 2017), Hlm. 33

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah maupun potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan serta alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹³

Tujuan Partisipasi Masyarakat yaitu mengimplikasikan masyarakat dalam mekanisme pengambilan keputusan, menyampaikan hak suara masyarakat dalam mekanisme pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan. Kemudian, untuk menjamin adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, maka pelaksanaannya harus

didasarkan pada konteks sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.¹⁴

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi digunakan dengan tujuan untuk mengelola suatu data. Pengolahan dalam hal ini adalah memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.¹⁵

Manfaat teknologi informasi diantaranya dapat mencari informasi sesuai kebutuhan secara cepat dan akurat, sebagai alat bantu dalam memfasilitasi penyampaian informasi, sehingga informasi tersebut dapat diterima dan dimengerti dengan mudah. Di Pemerintahan, teknologi informasi digunakan sebagai pelayanan masyarakat (*public service*), menyusun dan pengarsipan

¹³ Nuzula, T.T., *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat)*, (dalam Skripsi: Cimahi, Universitas Jenderal Achmad Yani, 2020), Hlm 8

¹⁴ Henry Sanoff, *Community Participation Methods in Design and Planning*, (USA: John Willey & Sons Inc), 2020, hlm 45

¹⁵ Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hlm. 7

data penduduk, mengolah data pada administrasi tata usaha, statistika, perencanaan, pengambilan keputusan, dan lain-lain.¹⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya penelitian ini meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, dan analisis data berupa statistik dengan menguji hipotesis yang ditetapkan.¹⁷ Pada penelitian ini peneliti menggunakan *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan bagi setiap unsur ataupun pada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sementara metode yang digunakan yaitu *purposive sampling*, merupakan teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan dan beberapa kriteria tertentu.¹⁸

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu perangkat desa di 19 desa pada Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu perangkat desa yang memenuhi kriteria yaitu berjumlah 114 orang. Teknik pengujian pada penelitian ini menggunakan software SPSS versi 20.0 Pada tahap pertama dilakukan uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, selanjutnya untuk teknik analisis data dengan uji analisis regresi linier berganda, dan Uji hepotesis menggunakan koefisien determinan (R²), Uji signifikan simultan (F), uji parsial (Uji t).

¹⁶ Murhada, & Giap, Y. C., *Pengantar Teknologi Informasi*,(Tanggerang: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 20

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,(Bandung:Alfabeta, 2016), hlm.11.

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 23

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Normalitas Data

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
Hasil Uji One Sample
Kolmogorov Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	,079

Sumber: data primer diolah SPSS 20, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas data diperoleh signifikansi sebesar 0,79 > 0,05, maka dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TPPD	,892	1,121
TPM	,952	1,050
TPTI	,935	1,070

a. Dependent Variable: TAPD

Sumber: data primer diolah SPSS 20, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas dikehui nilai Variance VIP dari semua variable < 10. Nilai tolerance dari semua variable juga < 10. Maka, dapat disimpulkan data yang digunakan dalam

penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TPPD	,892	1,121
TPM	,952	1,050
TPTI	,935	1,070

a. Dependent Variable: TAPD

Sumber: data primer diolah SPSS 20, 2022

Dari uji Heterokedastisitas dengan metode glejser diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel memiliki tingkat signifikansi > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	10,607	3,397
TPPD	,183	,070
TPM	-,050	,076
TPTI	,194	,071

a. Dependent Variable: TAPD

Sumber: data primer diolah SPSS 20, 2022

$$APDD = \alpha_0 + \beta_1PPD + \beta_2PM + \beta_3PTI$$

$$APDD = 10,607+ 0,183TPPD - 0,50TPM + 0,194TPTI$$

Berikut penjelasan atas persamaan regresi diatas :

- a) Nilai konstanta sebesar 10,607. Artinya apabila variabel independen (bebas) yaitu peran perangkat desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi, maka variabel dependen (terikat) yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa akan sebesar 10,607.
- b) Nilai koefisien regresi untuk variabel peran perangkat desa sebesar 0,183. Artinya setiap kenaikan satu satuan peran perangkat desa, maka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,183 dengan asumsi variabel yang lainnya tetap.
- c) Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat sebesar - 0,050. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini artinya jika variabel partisipasi masyarakat mengalami kenaikan 1% (satu

satuan), maka sebaliknya akuntabilitas pengelolaan dana desa akan menurun sebesar 0,050. Dengan asumsi variabel yang lainnya tetap konstan.

- d) Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,194. Artinya setiap kenaikan satu satuan peran perangkat desa, maka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,194 dengan asumsi variabel yang lainnya tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Hasil Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square
1	.387 ^a	.149

Sumber: data primer diolah SPSS 20, 2022

Dapat dijelaskan dari nilai R square sebesar 0,149. Nilai R square ini berasal dari nilai koefisien korelasi yaitu $0,387 \times 0,387 = 0,149$. Besarnya angka koefisien determinasi adalah 0,149 atau 14,9%. Angka tersebut berarti bahwa variabel independent yaitu peran perangkat

desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 14,9% sedangkan sisanya 85,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	F	Sig.
1 Regression	6,445	.000 ^b

Sumber: data primer diolah SPSS 20, 2022

Nilai F_{hitung} sebesar 6,445 dengan angka sig. $0,000 < 0,05$, sedangkan untuk F_{tabel} sebesar 2,70. Artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6,445 > 2,70$). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu peran perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama – sama atau simultan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan

dana desa. Dengan kata lain H_4 diterima dan H_0 ditolak.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 8
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	T	Sig.
1 (Constant)	3,123	,002
TPPD	2,628	,010
TPM	-,658	,512
TPTI	2,728	,007

Sumber: data primer diolah SPSS 20, 2022

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial diatas diketahui. Hasil uji T diperoleh untuk nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,628 > 1,983$) sehingga dihasilkan **H_0 ditolak H_1 diterima**. Dan dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 nilai signifikansi dibawah taraf 5% (sebesar $0,010 < 0,05$) yang berarti **H_0 ditolak H_1 diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikansi peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hipotesis (H_1) diterima.

Partisipasi Masyarakat menghasilkan nilai T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} ($-0,658 < 1,983$) maka hasilnya **H_0 diterima H_2 ditolak**. Dan

dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 nilai signifikansi dibawah taraf 5% (sebesar 0,512 > 0,05) yang berarti **H₀ diterima H₂ ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikansi partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hipotesis (H₂) ditolak.

Hasil uji T diperoleh untuk nilai t_{hitung} lebih besar dari $t_{tabel}(2, 728 > 1,983)$ sehingga dihasilkan **H₀ ditolak H₃ diterima**. Dan dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 nilai signifikansi dibawah taraf 5% (sebesar 0,007 < 0,05) yang berarti **H₀ ditolak H₃ diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikansi pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hipotesis (H₃) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan ada pengaruh positif signifikan peran perangkat desa

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi peran perangkat desa maka semakin tinggi juga tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga dengan tingginya peran perangkat desa maka semakin baik tanggungjawab terhadap dana desa. Dapat dikatakan bahwa dengan ikut berperannya perangkat desa dalam proses pengelolaan dana desa maka kualitas pengelolaan dana desa akan menjadi semakin baik, transparan dan akuntabel.

Perangkat desa di wilayah Kecamatan Pakel terbukti turut serta ikut dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Kepala desa telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran APBDesa. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan. Dalam hal ini, Kepala Desa berperan sebagai organisator pemerintahan di desanya untuk mencapai tujuan

pembangunan desanya dalam Otonomi Desa.¹⁹

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Sahala²⁰ dengan hasil yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam Otonomi Desa, Kepala Desa Bersama perangkat desa mempunyai peran untuk mengurus kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan tidak ada pengaruh positif signifikan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ini berarti

fungsi partisipasi masyarakat tidak mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa sangat penting, karena akan berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah desa serta untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang.²¹

Namun terdapat beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat di Kecamatan Pakel tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Diantaranya masyarakat cenderung kurang memperhatikan jalannya birokrasi pemerintah desa. Beberapa masyarakat tidak turut andil dalam keputusan-keputusan yang ada untuk membangun desa. Selain itu perangkat desa kinerjanya harus dikontrol, sehingga peran masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan pemikiran belum bisa berperan aktif.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nafadhila (2021) yang menyatakan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap

¹⁹ Siti Ulya Ani, Skripsi: *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dan Desa, (Studi Kasus pada Desa Pudaria aya Kecamatan Moramo)*, (Kendari: Fakultas Ekonomi Universitas dan Bisnis Universitas Halu Oleo, 2016), hlm. 13-17.

²⁰ Sahala Purba, *Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* Vol. 3 No. 1, 2020

²¹ Andrian Tawai & Muh Yusuf, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, (Kendari: Literacy Institute, 2017), hlm. 9

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Disini peran masyarakat dalam penilaian kinerja masih kurang sehingga dapat menyebabkan kurang maksimalnya pengalokasian anggaran desa. Partisipasi masyarakat melalui BPD menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah, tetapi dalam kenyataannya BPD tidak selalu berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini penyusunan anggaran dana desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan ada pengaruh positif signifikan pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi juga tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari hasil penelitian pemerintahan desa sudah mendapat akses internet dan peralatan komputer

yang memadai. Oleh sebab itu setiap desa sudah mempunyai website desa untuk memberikan informasi mengenai program-program desa dan setiap desa menggunakan aplikasi sistem keuangan yang memudahkan aparatur pengelola dana desa untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintahan yang lebih tinggi. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi ini dapat membantu mempercepat pelaporan dan memudahkan pengawasan karena informasi akan dihasilkan secara *real time*. Aulia (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Siti, dkk²² dengan hasil yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Pengaruh Peran Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis terakhir mengenai adanya pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan uji simultan menunjukkan bahwa

variabel peran perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, diantaranya:

- a. Peran perangkat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada 19 desa di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
- b. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada 19 desa di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada 19 desa di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

²² Siti Sarah, Taufeni Taufik, Devi Safitri, *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 4 No. 4, 2020

d. Peran perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada 19 desa di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

DAFTAR RUJUKAN

- Andri, <https://mayangkaranews.com>, diakses 21 April 2022, pukul 15.00
- Anggelita, Nora. 2019. Skripsi *Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang*. Magelang: fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhamadiyah Magelang.
- B.Uno, Hamzah dan Nina Lamatenggo. 2010. *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Baiq, dkk., 2020. "Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah, jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol. 30 No.7.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Blalock, Hubert M. Jr. 2018. *Pengantar Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Desa Gempolan, <https://gempolan-tulungagung.desa.id>, diakses 22 April 2022.
- Donaldson, Lex dan James H, Davis. 2011. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns". *Australian Journal of Management*. Vol. 16. No. 1.
- Halim A. dan Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Tiga, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Indrianasari, Neny Tri. 2017. "Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, Vol. 1 No. 2.
- Kurnia, Rahmi, dkk., 2019. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)", *jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1 No1.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Publisher.

- Murhada, dan Giap, Y. C. 2011. *Pengantar Teknologi Informasi*. Tangerang: Mitra Wacana Media.
- Murhada, dan Giap, Y. C. 2011. *Pengantar Teknologi Informasi*. Tangerang: Mitra Wacana Media.
- Nurhayati, Siti Nafsiah dan Mei Diana. 2020. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya". *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*. Vol 3. No. 2.
- Nuzula, T.T., 2020, Skripsi "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat)", Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi.
- Purba, Sahala. 2020. *Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* Vol. 3 No. 1.
- Sarah, Siti dkk. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4 No. 4. Sanoff, Henry. 2020. *Community Participation Methods in Design and Planning*, USA: John Willey & Sons Inc.
- Subagyo, Joko. 2015. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tawai, Andrian dan Yusuf. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, Kendari: Literacy Institute.